

2025



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL TASIKMALAYA



2024

LAPORAN TAHUNAN PPID TINGKAT III

Laporan Layanan
Informasi Publik
PPID Tingkat III
Tahun 2024



Hari Kekayaan Negara
Transformasi Pelayanan Menuju Indonesia Maju
Selamat Hari Kekayaan Negara (HKN) Ke - 18
1 November 2024

PROFESIONAL AMBAH SAKTUN TRANSPARAN INKLUSIF



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA

JALAN IR. H. JUANDA NOMOR 19, TASIKMALAYA 46151; TELEPON: (0265) 342637; FAKSIMILE: (0265) 342638; LAMAN:
www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III KPKNL TASIKMALAYA TAHUN 2024

A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Tasikmalaya sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal website DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id maupun melalui portal website KPKNL Tasikmalaya dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tasikmalaya>.

2. Dengan terbitnya PMK No. 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah

DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

3. Sarana dan Prasarana Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Tasikmalaya secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Tasikmalaya dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:
 - a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat.
 - b. Layanan Terpadu Online KPKNL Tasikmalaya dengan alamat <https://bit.ly/barayakpknltsaik>.
 - c. System Informasi PPID (SI-PPID).
 - d. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Tasikmalaya yaitu (0265) 342638 – Sementara (0265) 342637/342638 (Sedang Perbaikan).
 - e. Pesan teks melalui Whatsapp resmi KPKNL Tasikmalaya pada nomor 0811-796-777 (Layanan Pengelolaan Kekayaan dan 0811-8222-555 (Layanan Lelang Negara)
 - f. Serta melalui media social diantaranya Instagram (@kpknl_tasikmalaya), Facebook (Kpknl Tasikmalaya), Twitter (@kpknltsaikpast1), dan YouTube (@humaskpknltsaik5165).
4. Sumber Daya Manusia Guna mendukung layanan informasi melalui PPID KPKNL Tasikmalaya dengan salah satu tugas utama melakukan penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan merupakan Unit in Charge PPID Tingkat III. Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tasikmalaya terdiri dari 4 (empat) orang pegawai yang diantaranya Kepala Seksi Hukum dan Informasi dan 3 (tiga) pelaksana yang ditunjuk menjadi *Person in Charge* PPID Tingkat III serta 4 (empat) pegawai tiap unit selaku anggota Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Iii Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya Tahun 2024.
5. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik Selama tahun 2024, KPKNL Tasikmalaya tercatat bahwa terdapat 1 (satu) permintaan informasi publik. Adapun rincian pelayanan permintaan informasi publik tersebut ialah:
Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1 (satu) permintaan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	1 hari
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1 (satu) permintaan
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	Nihil
5	Kedudukan hukum Pemohon	Kab Garut

6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Melalui surat dan permohonan secara langsung
---	-----------------------------------	--

Rincian Penyelesaian Keberatan

Jumlah keberatan yang diterima	Nihil
Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Nihil

Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil mediasi dan/ atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi dan pelaksanaannya;	Nihil
3	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan tata usaha negara	Nihil
4	Hasil putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaannya;	Nihil

6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik Tidak ada kendala dalam pelayanan layanan informasi publik pada eksternal maupun internal pada KPKNL Tasikmalaya.
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada stakeholder di lingkup KPKNL Tasikmalaya, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkup KPKNL Tasikmalaya meliputi:
 - a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN;
 - b. Melaksanakan penanganan responsive terhadap krisis informasi di media cetak dan digital;
 - c. Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
 - d. Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada seperti layanan *online* pada kantor *vertical*, media sosial maupun sosialisasi rutin;
 - e. Penguatan publikasi dan dokumentasi dengan dukungan peralatan media yang mumpuni seperti kamera digital, kamera action gimbal portabel, perekam suara, aplikasi edit foto dan video untuk konten digital (canva dan capcut pro) beserta pelatihan dan sosialisasinya;
 - f. Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi di lingkup KPKNL Tasikmalaya melalui sarana pemberitaan, media sosial, artikel, dan lain-lain.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III
KPKNL Tasikmalaya
TAHUN 2024

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Pemohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis		Dasar Penolakan (jika permintaan informasi ditolak)				Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan			
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permalink Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai															
1	KPKNL Tasikmalaya	REG-1/PPID.KN.08.05/2024	27-Sep-24	Bangbang Riswandi Ruchiat	Perorangan	Pemohonan Status tanah tercatat BMN atau tidak	Orang Pribadi	Surat - Diterima Langsung	S-2412/KNL.08.05/2024	30-Sep-24	a.Terhadap Tanah sesuai kohir No.583, Persil 34, Kelas D III yang berada di Kp. Kiaradodot, RT.01 RW.01 Desa Gandamekar, Kecamatan, Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat adalah Tanah Bekas Milik Adat, Informasi status pencatatannya dapat diperoleh pada Kantor Desa dimana tanah tersebut berada. b.Tanah Negara yaitu Tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dipunyai hak atas tanah oleh pihak lain. Tanah Negara tidak termasuk dalam kategori Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Informasi mengenai tanah negara dapat diperoleh pada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Nama KPKNL	Nomor Registrasi (Sesuai Form)	Tanggal Permintaan Informasi Publik (Sesuai Form)	Jam Permintaan Masuk (diisi bila permohonan diterima melalui email/WA)	Penerusan / Diterima Langsung (Pilih dropdown)	Petugas Informasi	Nama Pemohon	NIK	Jenis Pemohon (Pilih dropdown)	Alamat	Telepon	E-mail	Pekerjaan	Informasi yang Diminta	Jalur Pemohonan (Pilih dropdown)	Tujuan Pengumuman Informasi	Instansi / UIC di Kanwil DJKN	Kelengkapan Syarat Administrasi	Nomor Surat Ketidakelegkapan	Tanggal Surat Ketidakelegkapan	Bentuk Informasi (Pilih dropdown)	Pemberitahuan Tertulis (Pilih dropdown)	Tanggapan atas Pemberitahuan Tertulis	Nomor Surat Perpanjangan	Tanggal Surat Perpanjangan	Nomor Surat Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Jatuh Tempo (10 HK/17 HK)	Lama Waktu Pemberian Informasi (Hari Kerja)	Pemohonan Informasi Publik Secara Umum. Terkait Lingkup	Keterangan
1	KPKNL Tasikmalaya	REG-1/PPID.KN.08.05/2024	27-Sep-24	-	Diterima Langsung	Moch Encep Iqbal Firdaus	Bangbang Riswandi Ruchiat	3205101912740001	Perorangan	Kp Kiaradodot RT.01/RW.01 Desa Gandamekar, Kec Kadungora, Kab Garut, Provinsi Jawa Barat	08122184071	bangbangrri@gmail.com	PNS	Pemohonan Informasi Status tanah tercatat BMN atau tidak	Surat/WA	Mengetahui status kepemilikan tanah secara hukum	Seksi HI dan PKN	Lengkap	S-2369/KNL.0805/2024	23-Sep-24	Naskah Elektronik (softcopy)	Diberikan sebagian	a.Terhadap Tanah sesuai kohir No.583, Persil 34, Kelas D III yang berada di Kp. Kiaradodot, RT.01 RW.01 Desa Gandamekar, Kecamatan, Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat adalah Tanah Bekas Milik Adat, Informasi status pencatatannya dapat diperoleh pada Kantor Desa dimana tanah tersebut berada. b.Tanah Negara yaitu Tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak dipunyai hak atas tanah oleh pihak lain. Tanah Negara tidak termasuk dalam kategori Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah (PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah). Informasi mengenai tanah negara dapat diperoleh pada Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	S-2412/KNL.0805/2024	30-Sep-24	10	6	PKN	Diberikan Informasi Konfirmasi terhadap Status Administrasi Tanah

Tasikmalaya, 3 Januari 2024
Pih Kepala KPKNL Tasikmalaya



Ditandatangani secara elektronik
Ariyanto

